

**PENGARUH KONEKSI POLITIK, KOMISARIS INDEPENDEN, KUALITAS AUDIT  
DAN KOMITE AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**Fahmi Rochmat Ngabdillah<sup>1\*</sup>, Bima Cinintya Pratama<sup>2</sup>, Novi Dirgantari<sup>3</sup>, Hardiyanto  
Wibowo<sup>4</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

\*E-mail Penulis Korespondensi: [fahmingabdillah@gmail.com](mailto:fahmingabdillah@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Koneksi Politik, Proporsi Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Proporsi Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Konvensional tahun 2017-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 41 perusahaan yang telah memenuhi kriteria. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Koneksi Politik yang terdiri dari Kepemilikan Negara atau Daerah tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dan Rangkap Jabatan berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*, variabel Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, serta variabel Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan variabel Komite Audit yang terdiri dari Jumlah Anggota Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dan Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Kata kunci: Koneksi Politik, Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, *Tax Avoidance*

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine the effect of Political Connections, Proportion of Independent Commissioners, Audit Quality, and Proportion of Audit Committees on Tax Avoidance. The population used in this study is Conventional Commercial Banks in 2017- 2020. The sampling technique used is purposive sampling technique in order to obtain a sample of 41 companies that meet the criteria. The data analysis technique used is multiple regression analysis with the help of the SPSS program. The results of this study indicate that the Political Connection variable consisting of State or Regional Ownership has no effect on Tax Avoidance and Multiple Positions has a negative effect on Tax Avoidance, the Independent Commissioner variable has no effect on Tax Avoidance, and the Audit Quality variable has a negative effect on Tax Avoidance. Meanwhile, the Audit Committee variable which consists of the number of members of the Audit Committee has no effect on Tax Avoidance and the Number of Audit Committee Meetings has a negative effect on Tax Avoidance.

Keywords: Political Connections, Independent Commissioner, Audit Quality, Audit Committee, Tax Avoidance

diterima	11 November 2021	direview	11 April 2022	diterbitkan	26 April 2022
----------	------------------	----------	---------------	-------------	---------------

## I. PENDAHULUAN

Pada tahun 1984 telah terjadi peristiwa *tax reform* dimana mengakibatkan perubahan pada sistem perpajakan di Indonesia yang awalnya adalah *official assessment system* berubah menjadi *self-assessment system* (Arianandini & Ramantha, 2018). Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self-assessment system* memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri (Yutaro & Miftatah, 2020). Hal ini akan terlaksana dengan baik apabila wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan sesuai undang-undang yang berlaku (Wicaksono, 2017). *Tax avoidance* merupakan salah satu langkah yang dilakukan wajib pajak badan dalam hal ini adalah perusahaan untuk menghindari pajak namun dengan cara yang legal (Ayu & Sumadi, 2019).

Koneksi politik yang digunakan perusahaan sering dimanfaatkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan bisnis dengan memanfaatkan koneksi politiknya (Asadanie & Venusita, 2020). Hubungan istimewa yang dimaksudkan antara pemilik perusahaan dengan pemerintah adalah pemilik perusahaan merupakan tokoh politik yang terkemuka baik sebagai anggota dewan baik itu di pemerintahan pusat dan daerah ataupun sebagai anggota partai politik (Wicaksono, 2017). koneksi politik juga dapat dilihat dari kepemilikan saham pemerintah (Darmayanti & Merkusyawati, 2019). Perusahaan berkoneksi politik melakukan penghindaran pajak dengan menjadikan koneksi politik yang dimiliki oleh anggota perusahaan sebagai jalan pintas dalam mencari keuntungan untuk perusahaan Asadanie & Venusita (2020). Studi di China menemukan bahwa para manajer berani melakukan kegiatan oportunistik karena merasa mendapat perlindungan dari elit yang berkuasa (Piotroski et al., 2015).

Banyak penelitian-penelitian mencoba menjelaskan pengaruh koneksi politik pada praktik *tax avoidance* tetapi hasil yang diperoleh masih berbeda. Diantaranya oleh Anggraini & Widarjo (2020), Maidina & Wati (2020), Wicaksono (2017), dan Butje & Tjondro (2014) yang menemukan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang berlawanan oleh Asadanie & Venusita (2020) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara Darmayanti & Merkusyawati (2019) menemukan bukti empiris bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Prosentasi dewan komisaris dalam suatu perusahaan secara tidak langsung mempengaruhi manajemen pajak (Eksandy, 2017). Komisaris independen memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik *tax avoidance* (Puspita & Harto, 2019). Adanya komisaris independen dalam perusahaan juga dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk mengelola perusahaan serta merumuskan strategi perusahaan yang lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan terkait tarif pajak efektif yang akan dibayarkan perusahaan (Diantari & Ulupui, 2016).

Penelitian mengenai *tax avoidance* telah banyak dilakukan. Antara lain oleh Maidina & Wati (2020), yang menemukan hasil bahwa prosentasi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang berlawanan oleh Diantari & Ulupui (2016), Ariawan & Putu Ery Setiawan (2017) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara Putriningsih dkk (2019) dan Widyastuti (2018) menemukan bukti empiris bahwa

prosentasi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kualitas audit dapat diartikan sebagai baik tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor (Yutaro & Miftatah, 2020). Auditor dengan reputasi yang baik akan memiliki dorongan untuk menyediakan kualitas audit yang tinggi secara terus menerus guna mencegah hal-hal yang nantinya dapat merusak reputasi mereka (Subarkah, 2018). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP spesialisasi industri dipercaya mampu mendeteksi kesalahan secara lebih baik sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu memungkinkan perusahaan memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh non KAP spesialisasi industri (Khairunisa dkk., 2017). Proses pengauditan dalam suatu perusahaan sangat dibutuhkan adanya sikap transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas. Dari keempat sikap tersebut transparansi merupakan salah satu faktor penting untuk menilai kualitas audit, karena adanya transparansi maka para pemegang saham dapat mengetahui informasi-informasi terkait perpajakan (Nugraheni & Pratomo, 2018).

Beberapa peneliti terdahulu seperti Eksandy (2017), Yutaro & Miftatah (2020) menemukan hasil bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang berlawanan oleh Asadanie & Venusita (2020), Khairunisa dkk (2017) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara Darmawan dkk (2020) menemukan bukti empiris bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Proposi komite audit adalah komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan kontrol dalam proses

penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen (Diantari & Ulupui, 2016). Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan (Tiala dkk, 2019). Semakin banyaknya pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen perusahaan akan menjamin bahwa manajemen tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan, seperti melakukan tindakan penghindaran pajak (Khairani, 2019).

Penelitian mengenai komite audit sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya adalah Sarra (2017) yang menemukan hasil bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang berlawanan oleh Maidina & Wati (2020), Arfenta Satria Nugraheni (2018), Eksandy (2017) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara Putriningsih dkk (2019) menemukan bukti empiris bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Studi ini berfokus pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2020. Perbankan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan sistem perekonomian nasional. Perbankan nasional menjadi salah satu bagian vital dalam perekonomian Indonesia. Krisis keuangan yang melanda Indonesia tahun 1997 mengakibatkan krisis perbankan terparah dalam sejarah perbankan nasional, menjadi pelajaran berharga tentang betapa pentingnya pengelolaan bank secara prudential dan transparan (Andika & Rahman, 2018).

### ***Agensi Theory***

Pendapat tentang *Agency theory* bahwa antara agen dan prinsipal mempunyai

perbedaan kepentingan dan keinginan (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak (Ayu & Sumadi, 2019). Principal mempercayakan pengambilan keputusan kepada agent, yang berarti kedua belah pihak telah mempunyai kesepakatan bersama atas tanggung jawab yang diserahkan kepada pihak agent (Subarkah, 2018). Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing bagian termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara principal dan agen (Darmawan et al., 2020).

### ***Upper Echelon Theory***

*Upper Echelon Theory* adalah suatu teori yang menganggap manajemen puncak sebagai pembuat keputusan strategi yang utama di dalam organisasi (Hambrick & Mason, 1984). *Upper echelon perspective* dapat diidentifikasi pada latar belakang yang tampak dari manajer atas seperti usia, pengalaman, pendidikan, latar belakang sosial, kondisi ekonomi, dan karakteristik kelompok sekitarnya (Asadanie & Venusita, 2020).

### **Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance***

Perusahaan dikatakan terkoneksi politik apabila perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki keterikatan secara politik atau berusaha menjalin hubungan kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Wati, 2017). Teori agensi menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan yang muncul antara pemilik utama perusahaan yaitu pemerintah yang berperan juga sebagai pembuat regulasi dalam hal perpajakan dengan pihak manajemen perusahaan yang berperan sebagai pembayar pajak (Wicaksono, 2017). *Upper echelon theory* menjelaskan tentang manajemen puncak (komisaris dan

direksi) yang memiliki latar belakang sosial dan karakteristik kelompok yang terdapat koneksi politik akan berani mengambil keputusan yang lebih berisiko karena di dukung oleh koneksi politiknya sehingga cenderung memilih untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan keuntungan perusahaan (Asadanie & Venusita, 2020).

Penelitian mengenai Koneksi Politik telah banyak dilakukan antara lain oleh Anggraini & Widarjo (2020), Maidina & Wati (2020), Wicaksono (2017), dan Butje & Tjondro (2014) yang menemukan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan koneksi politik yang dilakukan oleh perusahaan baik itu BUMN maupun BUMS adalah untuk melakukan lobby dengan pemerintah untuk menghindari pemeriksaan pajak, pengajuan pengurangan denda pajak maupun tindakan lain yang tergolong tax evasion atau tax agreeiveness (Wicaksono, 2017).

**H<sub>1</sub> : Presentase Kepemilikan Saham Negara Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Avoidance***

**H<sub>2</sub> : Rangkap Jabatan Dewan Direksi dan Komisaris Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Avoidance***

### **Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance***

Komisaris independen berkewajiban melakukan pengawasan dan kontrol terhadap perusahaan agar aktivitas yang dilakukan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang telah ditetapkan (N. M. Dewi, 2019). Berdasarkan teori keagenan semakin besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi tindakan pihak manajemen yang berhubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin saja terjadi (Jensen & Meckling, 1976).

Penelitian mengenai Proporsi Dewan Komisaris Independen telah banyak dilakukan antara lain oleh Diantari & Ulupui (2016), Ariawan & Setiawan (2017) yang menemukan hasil bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin banyaknya jumlah dewan komisaris independen akan menyebabkan perusahaan meminimalkan perilaku *tax avoidance* (Ariawan & Setiawan, 2017).

### **H<sub>3</sub> : Proporsi Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Negatif Terhadap *Tax Avoidance***

#### **Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance***

Kualitas Audit adalah kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menjamin aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan memastikan bahwa pengaturan tersebut telah diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan (Simanjuntak, 2008). Kualitas audit berupa transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat (Eksandy, 2017). Dalam teori agensi, agen bertindak untuk selalu menyelesaikan laporan tepat waktu agar perusahaan dapat go publik sehingga perusahaan yang awalnya tertutup dapat transparan mengenai laporan keuangan perusahaannya tersebut (Rahmawati et al., 2021). Salah satu bentuk monitoring yang dapat menurunkan biaya agensi adalah audit oleh kantor akuntan publik (Eksandy, 2017).

Penelitian mengenai Kualitas Audit telah banyak dilakukan antara lain oleh Asadanie & Venusita (2020), Khairunisa dkk (2017) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak (Feranika & Mukhzarudfa, 2016). Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan penghindaran

pajak, karena auditor yang termasuk dalam The Big Four lebih kompeten dan profesional dibandingkan dengan auditor yang termasuk dalam Non The Big Four, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan (Dewi & Jati, 2014).

### **H<sub>4</sub> : Kualitas Audit Berpengaruh Negatif Terhadap *Tax Avoidance***

#### **Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan teori keagenan, komite audit adalah agen yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen (Putriningsih et al., 2019). Komite audit dengan kewenangan yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance* (Diantari & Ulupui, 2016).

Penelitian mengenai Proporsi Komite Audit telah banyak dilakukan antara lain oleh Maidina & Wati (2020), Arfenta Satria Nugraheni (2018), Eksandy (2017), Diantari & Ulupui (2016) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi jumlah komite audit dalam perusahaan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak (Tiala dkk, 2019). Komite audit yang bertugas juga melakukan pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat mencegah kecurangan pihak manajemen. Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang

berlangsung dalam perusahaan (CG) (Diantari & Ulupui, 2016).

**H<sub>5</sub> : Jumlah Anggota Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap Tax Avoidance**

**H<sub>6</sub> : Jumlah Rapat Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap Tax Avoidance**

## II. METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan populasi dan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan pada tahun 2021 dengan berdasarkan kriteria sampel yang telah dipilih. Diperoleh sampel penelitian sebanyak 41 perusahaan untuk setiap tahunnya dimana periode yang digunakan dalam penelitian adalah tahun 2017-2020. Sehingga total keseluruhan sampel yang digunakan adalah sebanyak 142.

Tabel 1. Tabel Penentuan Jumlah Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Laporan keuangan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020	164
2.	Laporan keuangan perbankan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode penelitian	(3)
3.	Laporan keuangan perbankan yang tidak mempunyai kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian secara berturut-turut selama periode penelitian	(19)

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100$$

Jumlah observasi selama empat tahun (2017 – 2020)	142
---	-----

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

### Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

#### Tax Avoidance

Variabel *tax avoidance* diukur dengan *effective tax rate* (ETR) yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan (PPh Badan) dengan laba sebelum pajak (Hanum & Zulaikha, 2013).

#### Koneksi Politik

Karakteristik komite audit yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu Presentase kepemilikan saham Negara atau Daerah, dan Rangkap Jabatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

1. Presentase kepemilikan saham Negara atau Daerah

Pengukuran menggunakan jumlah presentase kepemilikan saham Negara atau Daerah. Salah satu pemegang saham terbesar perusahaan (siapa pun yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan 10% suara di perusahaan) (Savitri, 2020).

2. Rangkap Jabatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

Pengukuran variabel menggunakan *dummy*. 1 untuk perusahaan dengan koneksi politik dan 0 untuk perusahaan dengan tidak adanya koneksi politik (Pratiwi & Djakman, 2017).

Perusahaan diklasifikasikan memiliki hubungan politik setelah memenuhi salah satu dari kriteria berikut ini: salah satu pemegang saham mayoritas, dewan direksi direksi atau dewan komisaris pernah atau sedang tergabung dalam kelompok politik atau gelar seperti presiden, menteri, atau legislatif; ketua kaukus partai; ketua kampanye pemilihan presiden atau gubernur; memegang posisi berpengaruh di pemerintahan; dan jabatan sebagai pegawai di instansi

pemerintah atau militer (Kim & Zhang, 2016).

Bing Satrio (Yutaro & Miftatah, 2020).

### Proporsi Dewan Komisaris Independen

Informasi mengenai jumlah komisaris independen diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dan dari pengumuman yang dikeluarkan oleh BEI (Feranika & Mukhzarudfa, 2016). Dengan komisaris independen dapat diukur dengan menghitung proporsi  $\Sigma$  Komisaris Independen dengan  $\Sigma$  anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Sarra, 2017).

### Kualitas Audit

Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy* (Nugraheni & Pratomo, 2018). Dilihat dari perusahaan yang menggunakan jasa auditor KAP non big four Variabel Dummy:

Kategori 1 = Kantor Akuntan Publik yang tergolong kedalam Big Four

Kategori 0 = Kantor Akuntan Publik Non-Big Four (Darmawan et al., 2020).

Jenis-Jenis KAP Big Four di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. KAP Price Waterhouse Coopers,

$$\text{Ukuran Komite Audit} = \Sigma \text{Komite Audit}$$

yang bekerja sama dengan KAP Haryanto Sahari dan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan.

2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerja sama dengan KAP Sidharta dan Wijaya.
3. KAP Ernest and Young, yang bekerja sama dengan KAP Drs. Sarwoko dan Sanjoyo, Prasetyo Purwantono.
4. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerja sama dengan KAP Drs. Hans Tuanakota dan Osman

### Karakteristik Komite Audit

Karakteristik komite audit yang akan

$$\text{Rapat Komite Audit} = \Sigma \text{keseluruhan rapat}$$

digunakan dalam penelitian ini, yaitu ukuran komite audit, dan jumlah rapat audit.

- a. Ukuran Komite Audit

Skala pengukuran untuk variabel ini adalah skala nominal, dilakukan dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan (Haryanto, 2017).

- b. Rapat Komite Audit

$$\text{TAXAVOID} = \alpha + \beta_1\text{PK} + \beta_2\text{RANGJAB} + \beta_3\text{F} + \beta_6\text{KOMRAPAT} + \epsilon$$

Variabel rapat komite audit diukur dengan menghitung jumlah keseluruhan rapat yang telah dilaksanakan antar anggota komite audit dalam waktu setahun (Pudjianti & Ghazali, 2021).

### Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Akan tetapi sebelum dilakukan pengujian regresi linier berganda maka diperlukan pengujian terhadap uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk menguji serta memastikan kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### Keterangan:

#### Proporsi Dewan Komisaris Independen

$$= \frac{\Sigma \text{Dewan Komisaris Independen}}{\Sigma \text{Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

$\alpha$	: Konstanta	TAXAVOID	: <i>Tax Avoidance</i>
$\beta_1 - \beta_6$	: Koefisien regresi dari setiap variabel independen	PK	: Kepemilikan saham negara/daerah
RANGJAB	: Rangkap jabatan dewan direksi		
PDKI	: Proporsi Dewan Komisaris Independen		
KUALAUD	: Kualitas Audit		
KOMANGGOTA	: Ukuran Komite Audit		
KOMRAPAT	: Rapat Komite Audit		
$\epsilon$	: <i>Error term</i>		

proporsi komite audit yang diproksikan dengan jumlah rapat komite audit memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 11,2606.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TAXAVOID	0,00	4,74	0,2926	0,39466
PK	0,00	0,87	0,1369	0,27686
RANGJAB	0,00	0,17	0,0029	0,20680
PDKI	0,25	1,00	0,5938	0,13578
KUALAUD	0,00	1,00	0,5915	0,49329
KOMANGGOTA	2,00	8,00	3,8310	1,09785
KOMRAPAT	3,00	30,00	11,2606	6,27805

#### Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian	Hasil	Standar	Keterangan
<b>Normalitas - One Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>	Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,511	>0,05	Data terdistribusi normal
<b>Heteroskedastisitas - uji glejser</b>	Sig. (Koneksi Politik) = 0,635	>0,05	Bebas Heteroskedastisitas
	Sig. (Rangkap Jabatan) = 0,701		
	Sig. (PDKI) = 0,589		
	Sig. (Kualitas Audit) = 0,149		
	Sig. (Anggota Komite Audit) = 0,935		
	Sig. (Rapat Komite Audit) =		

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Berdasarkan tabel 2, menunjukkan pengujian terhadap 142 sampel amatan memberikan hasil bahwa *tax avoidance* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,2926 yang mengindikasikan bahwa variabel *tax avoidance* perbankan masih rendah karena dibawah 50%. Sedangkan variabel koneksi politik yang diproksikan dengan persentase kepemilikan saham negara/daerah memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,1369 atau 13,69%. Kemudian, koneksi politik yang diproksikan dengan rangkap jabatan dewan direksi memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,0029. Selanjutnya, variabel proporsi dewan komisaris independen memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 0,5938 atau 59,38%. Untuk variabel kualitas audit memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 0,5919 atau 59,19%. Kemudian, variabel proporsi komite audit yang diproksikan dengan anggota komite audit memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 3,8310 dan variabel

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients						
Model		Unstandarized	Standarized	t	Sig.	
		Coefficients	Coefficients			
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,313	0,023		13,67	0,000
	PK	0,005	0,015	0,036	0,342	0,733
	RANGJAB	0,313	0,154	0,182	2,033	0,045
	PDKI	-0,018	0,028	-0,061	-0,657	0,513
	KUALAUD	0,009	0,008	0,113	1,184	0,239
	KOMANGGOTA	-0,006	0,004	-0,149	-1,473	0,144
	KONRAPAT	-0,003	0,001	-0,423	-4,127	0,000

a. Dependent Variable: TAXAVOID

Pengujian	Hasil	Standar	Keterangan
	0,720		
<b>Multikolinieritas - nilai VIF</b>	VIF (Koneksi Politik) = 1,472	<10	Bebas Multikolinieritas
	VIF (Rangkap Jabatan) = 1,036		
	VIF (PDKI) = 1,102		
	VIF (Kualitas Audit) = 1,181		
	VIF (Anggota Komite Audit) = 1,314		
	VIF (Rapat Komite Audit) = 1,387		
<b>Autokolerasi - nilai Durbin-Watson</b>	d = 1,867	dU > d < 4-dU	Tidak Terdapat Autokor elasi

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Berdasarkan tabel 4, maka persamaan analisis regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{TAXAVOID} = & 0,313\text{TAXAVOID} + \\
 & 0,005\text{PK} + 0,313\text{RANGJAB} - 0,018\text{PDKI} \\
 & + 0,009\text{KUALAUD} - \\
 & 0,006\text{KOMANGGOTA} - \\
 & 0,003\text{KOMRAPAT}
 \end{aligned}$$

dewan direksi), proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan proporsi komite audit (anggota dan jumlah rapat komite audit) sebesar 15,1% sedangkan

Keterangan:

$\alpha$	:	Konstanta
$\beta_1 - \beta_6$	:	Koefisien regresi dari setiap variabel independen
TAXAVOID	:	<i>Tax Avoidance</i>
PK	:	Kepemilikan saham negara/daerah
RANGJAB	:	Rangkap jabatan dewan direksi
PDKI	:	Proporsi Dewan Komisaris Independen
KUALAUD	:	Kualitas Audit
KOMANGGOTA	:	Ukuran Komite Audit
KOMRAPAT	:	Rapat Komite Audit
$\epsilon$	:	Error term

Tabel 6. Hasil Uji Model Fit (Uji F)

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,035	6	0,006	4,268	0,001
	Residual	0,142	104	0,001		
	Total	0,177	110			

a. Dependent Variable: TAXAVOID  
 b. Predictors: (Constant), KOMRAPAT, RANGJAB, KOMANGGOTA, PDKI, KUALAUD, PK

sisanya sebesar 84,9% dijelaskan oleh variabel diluar model regresi, seperti kepemilikan institusional (Rinahaq & Widyawati, 2020), Leverage (Tiala dkk, 2019), profitabilitas (Darmawan et al., 2020) dan pertumbuhan penjualan (Ashari et al., 2020).

**Hasil Uji Statistik F**

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

**Hasil Uji Determinan (Adjusted R<sup>2</sup>)**

Tabel 5. Koefisien Determinan (Adjusted R<sup>2</sup>)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,444	0,197	0,151	0,03696

b. Predictors: (Constant), KOMRAPAT, RANGJAB, KOMANGGOTA, PDKI, KUALAUD, PK

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat dianalisis bahwa pengujian menunjukkan hasil nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,151 atau sebesar 15,1%. Hasil ini diartikan bahwa variabel dependen yaitu *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel koneksi politik (kepemilikan saham negara/daerah dan rangkap jabatan

**Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Hasil pengujian pada tabel 7. menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). T-statistik dihitung menggunakan kesalahan standar yang kuat. Signifikansi statistik diukur pada tingkat 1%, 5%, dan 10%.

**PEMBAHASAN**

**1. Pengaruh Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance***

Koneksi politik dalam penelitian ini menggunakan dua proksi yaitu kepemilikan saham negara/daerah dan rangkap jabatan dewan direksi. Hasil uji-t pada proksi kepemilikan saham negara/daerah menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,005 dengan

arah positif mempunyai nilai signifikansi  $0,733 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel koneksi politik dengan proksi kepemilikan saham negara/daerah tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dari hasil yang diperoleh yaitu  $t_{hitung} < t_{tabel}$  nilainya sebesar  $0,342 < 1,977$ . Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama **ditolak**. Koneksi politik tidak berpengaruh karena perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki pemerintah ditetapkan sebagai wajib pajak yang rendah resikonya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. Perusahaan akan menjaga citra yang baik agar keberlangsungan usahanya dapat terjamin (Lestari, 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Darmayanti & Merkusyawati (2019) dan Lestari (2017) menemukan bukti empiris bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kemudian hasil uji-t pada proksi rangkap jabatan dewan direksi menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,313 dengan arah positif mempunyai nilai signifikansi  $0,045 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu variabel koneksi politik dengan proksi rangkap jabatan dewan direksi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dari hasil yang diperoleh yaitu  $t_{hitung} > t_{tabel}$  nilainya sebesar  $2,033 > 1,977$ . Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua **diterima**. Koneksi politik yang ada dalam perusahaan dapat membuat perusahaan memiliki perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak rendah yang membuat perusahaan semakin menghindari pajak (Asadanie & Venusita, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Anggraini & Widarjo (2020), Maidina & Wati (2020), Wicaksono (2017), dan Butje & Tjondro (2014), yang menemukan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

## **2. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance**

Hasil uji-t menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,018 dengan arah negatif mempunyai nilai signifikansi  $0,513 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi yaitu variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dari hasil yang diperoleh yaitu  $t_{hitung} < t_{tabel}$  nilainya sebesar  $-0,061 < -1,977$  maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga **ditolak**. Dewan komisaris independen merupakan bagian perusahaan yang berasal dari luar manajemen, sehingga dewan komisaris independen cenderung tidak terpengaruh oleh tindakan manajemen, mereka cenderung mendorong manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para pemegang saham dan stakeholder (Widyastuti, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putriningsih dkk (2019) dan Widyastuti (2018) menemukan bukti empiris bahwa prosentasi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## **3. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance**

Hasil uji-t menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,009 dengan arah positif mempunyai nilai signifikansi  $0,239 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan

bahwa variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi yaitu variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dari hasil yang diperoleh yaitu  $t_{hitung} < t_{tabel}$  nilainya sebesar  $1,184 < 1,977$  maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat **ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik big four maupun Kantor Akuntan Publik non big four dalam melakukan audit laporan keuangan yang dapat disalah gunakan para pemegang saham untuk pencegahan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan Kantor Akuntan Publik baik big four maupun non big four memiliki reputasi yang baik dalam melakukan audit perusahaan yang berpedoman terhadap standar pengendalian mutu pada kualitas audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (DSAP IAPI) serta adanya aturan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sehingga dalam melaksanakan audit sudah dipastikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Nugraheni & Pratomo, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dkk (2020) yang menemukan bukti empiris bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### 4. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Variabel komite audit dalam penelitian ini menggunakan dua proksi yaitu anggota komite audit dan jumlah rapat komite audit. Hasil uji-t pada proksi anggota komite audit menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,006 dengan arah negatif mempunyai nilai signifikansi  $0,144 > 0,1$ . Hal ini

menunjukkan bahwa variabel independen yaitu variabel komite audit dengan proksi anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dari hasil yang diperoleh yaitu  $t_{hitung} < t_{tabel}$  nilainya sebesar  $1,473 < 1,656$ . Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima **ditolak**. Regulasi komite audit telah di tetapkan dalam BAPEPAM nomor Kep-20/PM/2004 tentang pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-103/MBU/2002 tentang pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara (bagi BUMN) yang menetapkan komite audit terdiri dari paling kurang 3 (tiga) orang anggota (Nugraheni & Pratomo, 2018). Ini dapat diartikan bahwa jumlah komite audit yang ada di dalam perusahaan bank baik besar atau kecil, tidak mampu mencegah adanya penghindaran pajak (Putriningsih dkk, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putriningsih dkk (2019) menemukan bukti empiris bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kemudian hasil uji-t pada proksi jumlah rapat komite audit menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,003 dengan arah negatif mempunyai nilai signifikansi  $0,000 < 0,01$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu variabel komite audit dengan proksi jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dari hasil yang diperoleh yaitu  $t_{hitung} > t_{tabel}$  nilainya sebesar  $4,127 > 2,615$ . Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam **diterima**. Keberadaan komite audit yang mempunyai tugas melakukan

pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja operasional agar dapat berjalan dengan baik, dalam mekanisme tata kelola perusahaan komite audit berperan aktif dalam penetapan kebijakan terkait dengan kebijakan beban pajak yang memiliki hubungan erat terhadap aktifitas penghindaran pajak (Nugraheni & Pratomo, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maidina & Wati (2020), Arfenta Satria Nugraheni (2018), Eksandy (2017), Nugraheni & Pratomo (2018) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kepemilikan Saham Negara/Daerah tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*; 2. Rangkap Jabatan Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*; 3. Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*; 4. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*; 5. Anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*; 6. Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti kepemilikan institusional, Leverage, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Andika, M., & Rahman, LF (2018). The Effect of Good Corporate Governance (GCG) Implementation on Financial Performance (Case Study on Banking

Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2014-2016). *Journal of Profiet*, 1(1), 51–57.

Anggraini, Y., & Widarjo, W. (2020). Political Connection, Institutional Ownership and Tax Aggressiveness in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, 5(5), 1–7. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.5.528>

Arianandini, PW, & Ramantha, IW (2018). Effect of Profitability, Leverage, and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *E-Jurnal Accounting*, 22, 2088. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17>

Ariawan, IMAR, & Setiawan, PE (2017). Effect of Independent Board of Commissioners, Institutional Ownership, Profitability and Leverage on Tax Avoidance. *E-Journal of Accounting*, 18(3), 1831–1859.

Asadanie, NK, & Venusita, L. (2020). The Effect of Political Connections on Tax Avoidance. *Journal of Accounting*, 4(1), 14–21.

Ayu, PC, & Sumadi, NK (2019). The Effect of Institutional Ownership and Managerial Ownership on Tax Avoidance. *Accounting And Finance*, 1(1), 87–104. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntans.i.v1i1.249>

Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Effect of Executive Characteristics and Political Connections on Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–9.

Darmawan, A., Akbar, B., Pangestu, D., Rahmawati, DV, Pratama, BC, Purwokerto, UM, & Banyumas, K. (2020). THE EFFECT OF PROFITABILITY, LEVERAGE, AND AUDIT QUALITY ON TAX AVOIDANCE (Study on banking companies listed on the IDX in 2017-*Research Journal of Accounting and Business Management (RJABM)*, 4(2),

- 116–124. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Accounting/article/view/57656/37034>
- Darmayanti, PPB, & Merkusyawati, NKLA (2019). The Influence of Company Size, Profitability, Political Connections and Disclosure of Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance. *E-Jurnal Accounting*, 26, 1992. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p12>
- Dewi, NM (2019). The Effect of Institutional Ownership, Independent Board of Commissioners and Audit Committee on Tax Avoidance in Banking Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2012-2016 Period. *MAXIMUM: Media Accounting University of Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40–51. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>
- Dewi, NNK, & Jati, IK (2014). The effect of executive character, company characteristics, and dimensions of good corporate governance on tax avoidance on the Indonesian stock exchange. 2, 249–260.
- Diantari, PR, & Ulupui, IA (2016). The Influence of the Audit Committee, the Proportion of Independent Commissioners, and the Proportion of Institutional Ownership on Tax Avoidance. *E-Journal of Accounting*, 16(1), 702–732.
- Eksandy, A. (2017). THE EFFECT OF INDEPENDENT COMMISSIONERS, AUDIT COMMITTEES, AND AUDIT QUALITY ON TAX AVOIDANCE (Empirical Study on the Consumer Goods Industry Sector listed on the Indonesia Stock Exchange 2010-2014). *Competitive Journal of Accounting and Finance*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>
- Feranika, A., & Mukhzarudfa, AM (2016). THE EFFECT OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP, INDEPENDENT BOARD OF COMMISSIONERS, AUDIT QUALITY, AUDIT COMMITTEE, EXECUTIVE CHARACTER, AND LEVERAGE ON TAX AVOIDANCE. *облемы современной ауки азования*, 17 (59).
- Hambrick, DC, & Mason, PA (1984). Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers. *Academy of Management Review*, 9, 193–206.
- Hanum, HR, & Zulaikha. (2013). The Influence of Corporate Governance Characteristics on Effective Tax Rate (Empirical Study on State-Owned Enterprises Listed on the IDX 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 201–210.
- Haryanto, YE (2017). The Influence of Company Size, Profitability, Board of Commissioners, Audit Committee and Audit Quality on Disclosure of Social Responsibility Information. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(4), 1–14.
- Jensen, MC, & Meckling, WH (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Khairani, S.-. (2019). The Effect of Profitability, Financial Distress, Independent Board of Commissioners and Audit Committee on Company Value Mediated by Tax Avoidance (Empirical Study on Consumer Goods Industrial Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange Period 2. *Journal of Accounting*, 9(1), 47–62. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.1.47-62>
- Khairunisa, K., Hapsari, DW, & Aminah, W. (2017). Audit Quality, Corporate Social

- Responsibility, And Company Size Against Tax Avoidance. *Journal of Contemporary Accounting Research*, 9(1), 39–46. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i1.366>
- Kim, CF, & Zhang, L. (2016). Institutional Knowledge at Singapore Management University Corporate political connections and tax aggressiveness Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. 78–114.
- Maidina, LP, & Wati, LN (2020). The Effect of Political Connections, Good Corporate Governance and Financial Performance on Tax Avoidance. *Journal of Accounting*, 9(2), 118–131. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i2.95>
- Nugraheni, AS, & Pratomo, D. (2018). THE EFFECT OF THE AUDIT COMMITTEE, AUDIT QUALITY, AND COMPANY SIZE ON TAX AVOIDANCE. *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2017–2018.
- Piotroski, JD, Wong, TJ, & Zhang, T. (2015). Political Bias of Corporate News in China: Role of Commercialization and Conglomeration Reforms. *SSRN Electronic Journal*, 0–59. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2674780>
- Pratiwi, IS, & Djakman, CD (2017). The Role of Corporate Political Connections in the Relations of CSR and Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *Review of Integrative Business & Economics Research*, 6(1), 345–358.
- Pudjianti, FN, & Ghozali, I. (2021). The Effect of Audit Committee Characteristics on CSR Disclosure with the Existence of Risk Management as an Intervening Variable. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 10(1), 1–13.
- Puspita, SR, & Harto, P. (2019). Tax evasion. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Putriningsih, D., Suyono, E., & Herwiyanti, E. (2019). Profitability, Leverage, Composition of the Board of Commissioners, Audit Committee, and Fiscal Loss Compensation Against Tax Avoidance in Banking Companies. *Journal of Business and Accounting*, 20(2), 77–92. <https://doi.org/10.34208/jba.v20i2.412>
- Rahmawati, E., Nurlaela, S., & Samrotun, YC (2021). Determination of Profitability, Leverage, Company Size, Capital Intensity and Company Age on Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business*, 5(1), 158–167. <https://doi.org/10.33087/economy.v5i1.206>
- Sarra, HD (2017). THE EFFECT OF ACCOUNTING CONSERVATISM, AUDIT COMMITTEE AND INDEPENDENT BOARD OF COMMISSIONERS ON TAX AVOIDANCE (Empirical Study on Chemical and Metal Industry in Indonesia Stock Exchange Period 2010-2014). *COMPETITIVE Journal of Accounting and Finance*, 1(1), 63. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.108>
- Savitri, E. (2020). MANUFACTURING COMPANIES IN INDONESIA. 200, 585–593.
- Simanjuntak, P. (2008). Effect of Time Budget Pressure and Risk of Error on Decreasing Audit Quality (Reduced Audit Quality) (Empirical Study on Auditor Kap in Jakarta). *Diponegoro University Undergraduate Program*.
- Subarkah, AR (2018). Effect of Executive Character, Company Size, Audit Quality, and Audit Committee on Tax Avoidance. *Accounting And Auditing*, 15(2), 204–220.
- Sudaryo, Y., Purnamasari, D., & Kartikawati, G. (2018). The Effect of Profitability, Leverage, Audit Quality, and Audit Committee on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2013-2017. *Indonesian Journal of Developing*, 17(3), 15–32.

- Tiala, F., Ratnawati, R., & Rokhman, MTN (2019). The Effect of the Audit Committee, Return on Assets (ROA), and Leverage on Tax Avoidance. *Journal of Applied Business*, 3(01), 9–20.  
<https://doi.org/10.24123/jbt.v3i01.1980>
- Wati, LN (2017). Board of commissioner's effectiveness on politically connected conglomerates: Evidence from Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 25(November), 255–270.
- Wicaksono, APN (2017). Political Connections and Tax Aggressiveness: Phenomenon in Indonesia. *Accountability*, 10(1), 167–180.  
<https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.5833>
- Widyastuti, DI (2018). THE EFFECT OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP, MANAGERIAL OWNERSHIP AND THE PROPORTION OF THE INDEPENDENT BOARD OF COMMISSIONERS ON TAX AVOIDANCE. *JEBDEER: Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research*, 1(2), 1–8.  
<https://doi.org/10.32616/jbr.v1i2.64>
- Yutaro, MKZ, & Miftatah, D. (2020). The effect of corporate social responsibility, capital intensity and audit quality on tax avoidance. *Trisakti Accounting Masters Journal*, 7(1), 25–40.